

INTEGRASI KEILMUAN IAIN RADEN INTAN MENUJU UIN

Oleh : Madnasir

Abstrak

Pemikiran integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama ini membawa kepada paradigma konsep islamisasi ilmu. Konsep tentang islamisasi ilmu pengetahuan ini pada dasarnya menjadi pemikiran untuk mengatasi dimana masih dirasakannya dualisme antara ilmu umum dan ilmu agama, yakni dengan mencoloknya perbedaan dan dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Untuk itu, diperlukan adanya suatu metode yang paling efektif guna mengatasi dualisme tersebut. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum ini juga dirasakan sangat penting untuk mencegah timbulnya sekularisme dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini juga penting dilakukan dalam rangka menghasilkan lulusan pendidikan yang utuh, yaitu pribadi yang berpikir integrated.

Kata kunci : *Integrasi keilmuan, IAIN, UIN*

A. Pendahuluan

Upaya perubahan beberapa perguruan tinggi agama Islam untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum menandakan sebuah proses kesadaran yang lebih maju, dimana selama ini IAIN di anggap kampus yang memproduksi guru-guru agama atau calon-calon ustad, dan pada akhirnya ada stigma bahwa alumni atau lulusan dari IAIN merupakan ustad atau guru agama. Pembentukan UIN merupakan bagian dari usaha menginterasikan beragam keilmuan untuk mengeliminasi dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama, Integrasi antara Ilmu Agama dan Ilmu Umum.

Pengembangan IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 31 tahun 2002 tepatnya tanggal 20 Mei 2002, dimana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sebelumnya berada di balik konsep IAIN “*with wider mandate*” akhirnya bertransformasi menjadi universitas, sekaligus menjadi PTAIN (IAIN) pioneer yang mengubah status lembaganya menjadi UIN. Selanjutnya transformasi tersebut diikuti pula oleh 5 (lima) IAIN/STAIN lainnya di Indonesia yang juga bertransformasi menjadi universitas, yakni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN SUKA Yogyakarta), STAIN Malang (sekarang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), IAIN Sulthan Syarif Qasim Riau (UIN Sulthan Syarif Qasim Riau), IAIN Alauddin Makassar (sekarang UIN Alauddin Makassar), dan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (sekarang UIN Bandung).

Dalam sejarah kemajuan dan kemunduran Islam sekitar abad XIII-XIX, justru pihak Barat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya dari Islam sehingga ia mencapai masa *renaissance*. Ilmu pengetahuan umum (sains) berkembang pesat sedangkan ilmu pengetahuan Islam mengalami kemunduran, yang pada akhirnya muncullah dikotomi antara dua bidang ilmu tersebut.

Tidak hanya sampai di sini tetapi muncul pula sekularisasi ilmu pengetahuan. Namun sekularisasi ilmu pengetahuan ini mendapat tantangan dari kaum Gereja. Galileo (L. 1564 M) yang dipandang sebagai pahlawan sekularisasi ilmu pengetahuan mendapat hukuman mati tahun 1633 M, karena mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pandangan Gereja. Galileo memperkokoh pandangan Copernicus bahwa matahari adalah pusat jagat raya berdasarkan fakta empiris melalui observasi dan eksperimen. Sedangkan Gereja memandang bahwa bumi adalah pusat jagat raya (*Geosentrisme*) didasarkan pada informasi Bibel.¹

Pemberian hukuman kepada para ilmuwan yang berani berbeda pandangan dengan kaum Gereja menjadi pemicu lahirnya ilmu pengetahuan yang memisahkan diri dari doktrin agama. Kredibilitas Gereja sebagai sumber informasi ilmiah merosot, sehingga semakin mempersubur tumbuhnya pendekatan saintifik dalam ilmu pengetahuan menuju ilmu pengetahuan sekuler. Sekularisasi ilmu pengetahuan secara ontologis membuang segala yang bersifat religius dan mistis, karena dianggap tidak relevan dengan ilmu.

Sekularisasi ilmu pengetahuan dari segi metodologi menggunakan epistemologi rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme berpendapat bahwa rasio adalah alat pengetahuan yang obyektif karena dapat melihat realitas dengan konstan. Sedangkan empirisme memandang bahwa sumber pengetahuan yang absah adalah empiris dalam dunia nyata. pada aspek aksiologi bahwa ilmu itu bebas nilai atau netral, nilai-nilai ilmu hanya diberikan oleh manusia

¹ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 3.

pemakainya. Memasukkan nilai ke dalam ilmu, menurut kaum sekular, menyebabkan ilmu itu “memihak”, dan dengan demikian menghilangkan obyektivitasnya.

Kondisi inilah yang memotivasi para cendekiawan muslim berusaha keras dalam mengintegrasikan kembali ilmu dan agama. Upaya yang pertama kali diusulkan adalah islamisasi ilmu pengetahuan. Upaya “islamisasi ilmu” bagi kalangan muslim yang telah lama tertinggal jauh dalam peradaban dunia moderen memiliki dilema tersendiri. Dilema tersebut adalah apakah akan membungkus sains Barat dengan label “Islami” atau “Islam”? Ataukah berupaya keras menransformasikan normativitas agama, melalui rujukan utamanya Alquran dan Hadis, ke dalam realitas kesejarahannya secara empirik? . Kedua-duanya sama-sama sulit jika usahanya tidak dilandasi dengan berangkat dari dasar kritik epistemologis. Dari sebagian banyak cendekiawan muslim yang pernah memperdebatkan tentang islamisasi ilmu, di antaranya bisa disebut adalah: Ismail Raji Al-Faruqi, Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Fazlur Rahman, dan Ziauddin Sardar. Kemunculan ide: “Islamisasi ilmu” tidak lepas dari ketimpangan-ketimpangan yang merupakan akibat langsung keterpisahan antara sains dan agama. Sekulerisme telah membuat sains sangat jauh dari kemungkinan untuk didekati melalui kajian agama. Pemikiran kalangan yang mengusung ide “Islamisasi ilmu” masih terkesan sporadis, dan belum terpadu menjadi sebuah pemikiran yang utuh. Akan tetapi, tema ini sejak kurun abad 15 H., telah menjadi tema sentral di kalangan cendekiawan muslim.²

Pemikiran integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama ini membawa kepada paradigma konsep islamisasi ilmu. Konsep tentang islamisasi ilmu pengetahuan ini pada dasarnya menjadi pemikiran untuk mengatasi dimana masih dirasakannya dualisme antara ilmu umum dan ilmu agama, yakni dengan mencoloknya perbedaan dan dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Untuk itu, diperlukan adanya suatu metode yang paling efektif guna mengatasi dualisme tersebut. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum ini juga dirasakan sangat penting untuk mencegah timbulnya sekularisme dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini juga penting dilakukan dalam rangka menghasilkan lulusan pendidikan yang utuh, yaitu pribadi yang berpikir *integrated*.

Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka dapat diambil suatu alternatif metode, yaitu dengan terlebih dahulu mengintegrasikan semua disiplin ilmu di dalam kerangka kurikulum Islam. Mungkin cara ini akan menyalahi pembakuan disipliner yang sudah mapan seperti yang dikenal sampai sejauh ini, dan dalam implikasi institusionalnya akan berarti perombakan pembidangan fakultas dan jurusan. Setelah pada tahun-tahun pertama mahasiswa menempuh semua *courses* mata kuliah dasar yang sudah terintegrasikan di dalam kurikulum yang sudah dipadukan antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum, maka dalam jenjang-jenjang berikutnya mahasiswa akan memilih spesialisasi yang diminati. Program-program studi lanjutan ini merupakan pendalaman untuk spesialisasi, termasuk misalnya untuk bidang-bidang ilmu yang berorientasi pada kebijakan praktis.³

Integrasi keilmuan tersebut dapat terlaksana jika IAIN punya kebebasan penuh untuk mendirikan universitas Islam secara otonom, yang di dalamnya universalitas ilmu digodok lebih dulu dalam kerangka Islam. Bukan seperti selama ini yang hanya melaksanakan pengajaran multifakultas. Untuk mengembangkan “ilmu-ilmu pasti” dalam program studi Islam, sangat memungkinkan karena Islam memiliki warisan yang banyak dalam bidang tersebut. Pada zaman klasik dan pertengahan Islam, “ilmu-ilmu pasti” seperti matematika, astronomi, kedokteran, kimia, geografi, fisika, dan sebagainya sangat berkembang. Dengan pengembangan demikian, program studi Islam tidak hanya dipandang sebagai program teologi Islam atau penelitian hukum Islam.

Perkembangan yang terjadi sampai saat ini adalah bahwa perluasan kesempatan mengikuti pendidikan tinggi Islam yang demikian cepat, belum diikuti sepenuhnya dengan tersedianya sarana, prasarana dan tenaga akademik yang sesuai dengan persyaratan minimal sebuah perguruan tinggi, sehingga banyak perguruan tinggi Islam yang dalam prakteknya tidak lebih dari perpanjangan praktek pembelajaran sekolah menengah/aliyah, yang hanya akan menghasilkan *outcome* sarjana yang kurang berkualitas (minim *skill* dan tidak *marketable*). Ini menjadi salah satu pemicu (selain alasan rasionalitas, tuntutan, dan kebutuhan “mendesak”) bagi IAIN/STAIN untuk mengubah secara sistemik dan legal status lembaganya menjadi universitas. Untuk itu, kajian tentang konversi IAIN menjadi UIN ini masih tetap urgen untuk dibahas, baik melalui segi konsep (aturan-aturannya), maupun segi realitas-objektif dari perubahan yang terjadi atas konversi tersebut.

B. Problematika Kebijakan Pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam

² Moh. Natsir Mahmud, *Landasan Paradigmatik Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, Nurman Said, Wahyuddin Halim Muhammad Sabri, (ed), Op.cit; h. 129

³ *Ibid.*

Di Indonesia, perguruan-perguruan tinggi Islam secara keseluruhan belum dapat dilihat sebagai sistem pendidikan yang memiliki kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom. Sebagaimana dinyatakan oleh Hamid Hasan Bilgrami dan Syed Ali Ashraf bahwa terbentuknya Universitas Islam semacam itu memerlukan perjalanan yang panjang untuk mengoreksi situasi yang ada dan mengembangkan suatu sistem pendidikan terpadu bagi dunia Islam.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, syarat-syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu menurut Bilgrami dan Ashraf antara lain: *Pertama*, adanya konsep pendidikan dan landasan umum yang terpadu, meliputi konsep ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam pandangan Islam, serta adanya kebebasan lembaga-lembaga Islam dan kebebasan lembaga-lembaga tersebut dalam bidang studi yang harus diajarkan, pengajarannya, dan pengorganisasiannya; *Kedua*, konseptualisasi. Universitas Islam tidak akan terwujud hanya karena adanya uang, SK (pendirian), gedung-gedung, atau karena telah adanya banyak sarjana dalam berbagai bidang. Jadi prinsip utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah bahwa Universitas Islam sejak awal harus berorientasi kepada penelitian; *Ketiga*, staf. Diperlukan adanya civitas akademik yang memiliki jiwa pengabdian, ketekunan, disiplin, luasnya pandangan, dan pemahaman kritis; *Keempat*, seleksi mahasiswa. Guna mendukung tercapainya peningkatan mutu, maka diperlukan seleksi yang lebih ketat terhadap mahasiswa yang akan masuk ke Universitas tersebut; *Kelima*, tradisi akademik. Secara umum dapat dikatakan bahwa sikap mental ilmiah belum terbentuk di IAIN/UIN, baik di kalangan dosen, apalagi di kalangan mahasiswa. Suasana di kampus sampai sekarang ini boleh dikatakan belum lagi ilmiah akademis. Yang terlihat merupakan suasana rutinitas civitas akademika yang menyelenggarakan proses pendidikan dari hari ke hari; *Keenam*, Islamisasi Ilmu Pengetahuan dalam kaitannya dengan ciri keterbukaan dan kebebasan Universitas; *Ketujuh*, adanya kurikulum inti; *Kedelapan*, adanya lembaga-lembaga penunjang; dan *Kesembilan*, adanya pendidikan/pelatihan ketenagapengajaran guna pengembangan metodologi pengajaran.⁴

Untuk itu, prinsip pokok yang menjadi dasar pembelajaran dalam universitas Islam yakni pentingnya memperhatikan kepehaman, mengetahui hubungan, kepaduan dan kelanjutan pengalaman, sifat baru, keaslian, dan kebebasan berpikir. Kalau pendidikan Islam menaruh perhatian pada hapalan dalam ilmu-ilmu syari'at, bahasa dan kesusasteraan sebab pertaliannya dengan riwayat dan naqal, tetapi ia tidak dapat begitu saja mengabaikan kepehaman dan pemikiran termasuk yang berkaitan dengannya seperti mengenal hubungan dan pertalian yang terkandung dalam pengalaman pendidikan atau suasana pengajaran. Juga berkaitan dengan kepehaman dan pemikiran adalah pandangan yang menyeluruh dan lengkap melengkapi dalam setiap masalah. Begitu juga dengan keaslian dan kebebasan berpikir, malah yang terakhir mendapat perhatian penuh dan menuntut supaya orang-orang yang bekerja di dalamnya, termasuk dosen dan pembimbing agar menjaga dan menerapkannya dalam segi aktivitas pengajaran dan pendidikan.

C. Analisis SWOT dalam optimalisasi IAIN menjadi UIN

Dalam proses diubahnya IAIN "*with wider mandate*"/STAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), ada beberapa kendala yang selama ini diprediksi menjadi ganjalan kemulusan jalan IAIN/STAIN menjadi UIN, yakni kendala *teknis*, *psikologis*, *epistemologis*, dan *birokratis*.

Pertama, kendala *teknis*. Kendala ini berkaitan dengan masalah fasilitas dan sumber daya manusia (SDM). Untuk menjadi sebuah universitas, fasilitas yang dibutuhkan tentu saja harus memenuhi standar sebuah universitas. Semua itu membutuhkan pemikiran, perencanaan, serta strategi pengembangan yang baik. Selain itu, selama ini IAIN memfokuskan dirinya pada basis keislaman dengan berbagai cabangnya, sehingga pengembangan internal SDM-nya pun lebih terfokus pada keahlian di bidang agama (*Islamic Studies*). Alumnus IAIN yang kemudian menjadi tenaga pengajar di IAIN kebanyakan hanya memiliki basis keilmuan agama (Islam), sedangkan tenaga kependidikan yang diterjunkan untuk mendalami bidang studi umum masih sangat terbatas.

Kedua, kendala *psikologis*. Kendala ini berimplikasi kepada kenyataan bahwa alumnus IAIN dianggap hanya mumpuni di lahan keagamaan saja. Ditambah lagi dengan gelar Sarjana Islam pada semua fakultas yang dimilikinya membuat masyarakat semakin yakin bahwa alumnus IAIN memang patut dianggap *expert* hanya di bidang keislaman, sehingga dianggap tidak kompeten untuk menyelenggarakan pendidikan umum. Ini menimbulkan dampak psikologis yang kurang sehat.

⁴ M.Shaleh Putuhena, *op.cit.*, h. 107.

Ketiga, kendala epistemologis. Ada anggapan bahwa pembukaan fakultas-fakultas umum di lingkungan Universitas (eks IAIN) akan berdampak beralihnya arus minat bakal calon mahasiswa terhadap IAIN, karena kemungkinan besar fak-fak non agama ini akan lebih diminati, mengingat kondisi pasar yang cenderung pragmatis. Sementara itu peminat untuk fak-fak keagamaan (syariah, tarbiyah, ushuluddin, dan dakwah) di lingkungan Universitas baru ini akan semakin kecil.

Keempat, kendala birokratis. Dahulu, di awal munculnya rencana konversi IAIN menjadi UIN, berimbang pada tarik ulur kepentingan antara Kemenag yang selama ini dikenal sebagai departemen induk yang membina dan bertanggungjawab terhadap IAIN, dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang secara yuridis formal berdasarkan PP No. 60 tahun 1999 berhak untuk membawahi semua universitas. Tentu saja secara implisit PP ini tidak membolehkan pengelolaan universitas di bawah dua atap.⁵

Untuk itu ada dua kemungkinan yang dapat menjadi alternatif wewenang pengelolaan, yakni alternatif *pertama* memposisikan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pengelola tanggungjawab operasional universitas baru (UIN), dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melaksanakan fungsi pembinaan fak-fak umum, atau alternatif *kedua*, memposisikan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sebagai pengelola tanggungjawab operasional universitas baru (UIN), dan Kementerian Agama (Kemenag) melaksanakan fungsi pembinaan fakultas-fakultas umum.

Paradigma penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah otonomi, mutu pendidikan, akuntabilitas, evaluasi diri dan akreditasi. Fokus pengembangan pendidikan tinggi bertumpu pada paradigma baru yaitu daya saing bangsa, kesehatan organisasi dan otonomi perguruan tinggi yang berpedoman pada kerangka pengembangan pendidikan tinggi. Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, institusi pendidikan tinggi harus menjadi organisasi yang sehat, dan dalam organisasi yang sehat peningkatan mutu berkelanjutan dilakukan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mutu pendidikan tinggi ditentukan oleh kemampuan perguruan tinggi menetapkan dan mewujudkan visi melalui misi yang harus dilaksanakan dan kemampuan memenuhi kebutuhan *stakeholders* yang meliputi kebutuhan dunia kerja masyarakat dan kebutuhan profesional. Berdasarkan kebijakan tersebut maka pendidikan tinggi harus mampu menciptakan masyarakat ilmu pengetahuan yang memiliki semangat menghadapi era persaingan baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Itulah sebabnya pendidikan tinggi harus menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang tergambar pada pengelompokan mata kuliah, proses pembelajaran dan evaluasi, pengadaan fasilitas, perubahan perilaku, serta peran dosen dan mahasiswa.⁶

Pembelajaran yang efektif memperhatikan orientasi (1) isi materi pembelajaran diarahkan lebih kepada tujuan pencapaian elemen kompetensi, (2) metode pembelajaran lebih banyak kepada student center learning (3) strategi mengajar lebih difokuskan pada memberi bekal how to learn dan method of inquiry, (4) belajar dapat dilakukan di dalam dan di luar kelas atau di dalam dan di luar kampus, dan (5) cara mengevaluasi lebih ditekankan pada evaluasi proses dan hasil terhadap adanya perubahan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

Mahasiswa sebagai masyarakat ilmu pengetahuan diharapkan akan menjadi lulusan yang kompeten di bidangnya, sehingga mampu bersaing dalam menghadapi fenomena kehidupan. Oleh karenanya bekal selama mengkonstruksikan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, tidak hanya pengkayaan isi dari ilmu pengetahuan tersebut, namun mahasiswa perlu pengkayaan dalam cara mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut.

Di Provinsi Lampung terdapat tiga buah Perguruan negeri seperti UNILA, IAIN Dan STAIN Metro, dan banyak perguruan tinggi swasta lainnya. Secara kelembagaan perguruan tinggi tersebut telah memenuhi ketentuan dasar keberadaannya, sebab diproses melalui syarat dan mekanisme yang ditentukan oleh perundang-undangan. Dalam operasionalisasinya terdapat juga PTN/ PTS yang terhambat, tersendat bahkan terhenti, terutama dalam penyelenggaraan Program Studinya. Permasalahan yang dialami oleh PTN dan PTS meliputi infrastruktur, mahasiswa, pembiayaan, proses akademik, dan kualitas lulusan.

Problematika di atas berimplikasi bagi masalah kualitas yang belum optimal, baik kualitas kelembagaannya maupun kualitas lulusan yang menjadi out put bagi Perguruan tinggi pada umumnya. Bagi IAIN Raden Intan patut disyukuri bahwa berdasarkan hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, mendapat akreditasi yang baik, walau belum mendapat akreditasi puncak, rata-rata A Dan B untuk tingkat Fakultas Pada Masing-masing Jurusan yang ada. Walau demikian alumni dari IAIN Raden Intan rata-rata dapat di terima Baik

⁵ Prof.DR.H.M. Amin Abdullah, dkk., *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*, (Cet I; Yogyakarta: Penerbit Suka Press, 2007), h. 33.

⁶ Prof.DR. Moh. Natsir Mahmud, *Landasan Paradigmatik Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, Nurman Said, Wahyuddin Halim Muhammad Sabri, (ed), Op.cit; h. 129

di Intitusi Pemerintahan maupun Swasta. baik sebagai Dosen, guru, Hakim, pegawai Perbankan, mubalig, pimpinan organisasi Islam, kader politik dan lain-lain. Memang masih banyak alumni yang berorientasi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil baik di lingkungan kementerian Agama atau Departemen lain dan Pemerintah Daerah.⁷

IAIN menuju UIN kedepan dalam peroses Integrasi keilmuan sesuai dengan Visi dan misi yang berorientasi pada tujuan yang ditetapkan oleh regulasi sistem pendidikan nasional yakni : (1) Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keagungan akhlak, kearifan spiritual, keluasan ilmu dan kematangan professional, (2) Mengembangkan penelitian bagi pengembangan proses dan produk ilmu agama Islam secara multidisipliner dan interdisiplin yang terpadu dengan nilai-nilai Islami dan tanggung jawab sosial, (3) Menyebarkan ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terpadu dengan nilai-nilai Islami serta mengupayakan untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Pengembangan tujuan PTAI harus mengarah pada upaya menghasilkan lulusan yang memiliki mutu kompetensi yang diakui luas dan memiliki daya saing tinggi serta mampu berkiprah dalam kehidupan masyarakat.

Kompetensi lulusan bersifat komprehensif namun dengan penekanan pada kompetensi tertentu pada program studi, Kompetensi tersebut meliputi kompetensi akademik, intelektual, profesional, kepemimpinan dan spiritual. Kompetensi akademik adalah kapasitas dan kewenangan dalam pemahaman teori keilmuan, kompetensi intelektual adalah kemahiran dalam problem solving atas suatu masalah berdasarkan teori yang relevan melalui analisis pemecahan masalah yang akurat Kompetensi profesional merupakan keterampilan mengimplementasikan teori dan ilmu pada kehidupan sehari-hari. Kompetensi kepemimpinan adalah kemampuan pengambilan keputusan dalam setiap aktivitas pembangunan. Adapun kompetensi spiritual adalah kapasitas diri sebagai insan yang beriman dan bertaqwa untuk membingkai kapasitas kesarjanaannya.⁸

Indikator mutu lulusan yang harus dikejar adalah diakui setara dengan lulusan perguruan tinggi terkemuka, dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi mana pun tanpa syarat, mampu bersaing dalam mengisi lapangan kerja profesional, dan dapat memainkan peran strategis dan konstruktif dalam kehidupan masyarakat modern.

Atas dasar itu, maka pengembangan Interasi Kelimuan IAIN Menuju UIN merupakan keniscayaan yang harus ditunaikan dengan memperhatikan prinsip bahwa setiap kebijakan dan usaha pendidikan tinggi dipandang sebagai investasi hanya jika menghasilkan lulusan yang bermutu, dan prinsip bahwa pelaku utama pendidikan tinggi adalah dosen yang mengajar dan mahasiswa yang belajar dengan wahana Atmosfir Kampus yan nyaman, Asri, di dukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap.

Untuk mengadakan pengembangan menjadi suatu Universitas Islam kita harus melakukan analisis tentang kondisi positif dan negatif baik internal maupun eksternal, yang biasa disebut dengan analisis SWOT, sehingga diketahui faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dirumuskan visi, misi, strategi, kebijakan, sasaran dan program pengembangan yang berlaku untuk kurun waktu tertentu, misalnya 5 tahun.

Visi merupakan pandangan dan jangkauan ke depan untuk jangka waktu tertentu yang secara substantif meliputi esensi Islam, ilmu dan pembangunan, dan secara dinamik meliputi proses pencerahan (*enlighting*) dan pemberdayaan (*empowerment*) untuk peningkatan kualitas dan keunggulan, sehingga diharapkan menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif pada tingkat regional, nasional dan global dalam mengembangkan sumber daya manusia, ilmu agama Islam dan nilai-nilai Islami untuk disumbangkan bagi pembangunan masyarakat bangsa yang lebih terbuka dan demokratis.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. maka IAIN Raden Intan harus merumuskan misi yang merupakan perpaduan antara tujuan dan fungsi kelembagaan. Misi seyogyanya meramu benang merah antara pemahaman, pengamalan dan pengembangan Islam dalam kehidupan, yakni tathim, tathbiq dan tadbir. Menyiapkan tenaga ahli yang berakhlak mulia untuk menjaga warga masyarakat yang berkualitas dan mandiri serta mampu menemukan, mengembangkan dan menerapkan ilmu dan ditengah-tengah masyarakat.

Untuk merealisasikan visi dan misi harus dirumuskan kebijakan berupa prinsip dinamika yang sistemik yang menjadi acuan umum program pengembangan. Pada kondisi sekarang kebijakan yang relevan untuk ditempuh oleh PTAI antara lain : Pengembangan paradigma keilmuan yang mewujudkan keterpaduan iman taqwa, ilmu pengetahuan, teknologi dan sem,

⁷ Hidayat, Komaruddin (Edt.) dan Prasetyo, Hendro, *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam* (Jakarta: Ditbinpertais dan Dirjenbinbagais, 2000).

⁸ Azra, Azyumardi. *Reintegrasi Ilmu-Ilmu, Integrasi Ilmu dan Agama, Interpretasi dan Aksi*, Bandung: Mizan, 2005

Pengembangan kinerja kelembagaan, ketenagaan, dan seluruh aspek substansi akademik, dan Pengembangan akreditasi dalam kualitas, relevansi, efisiensi dan perluasan kesempatan.

Sedangkan dalam strategi pengembangan perlu memperhatikan (1) Deregulasi pedoman untuk akselerasi peningkatan mutu pendidikan tinggi, (2) Penataan dan fungsionalisasi institusi bagi efektifitas pencapaian tujuan sejalan dengan semangat reformasi, (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga terwujud tenaga yang produktif, bersih, berwibawa dan berakhlak mulia, (4) Peningkatan kualitas akademik dan kemahasiswaan sebagai tanggung jawab kompetensi, (5) Otonomi dan transparansi penyelenggaraan serta debirokratisasi mekanisme kegiatan dan pelayanan dengan efisiensi efektifitas, akuntabilitas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi Islam.⁹

Dalam upaya mewujudkan pengembangan tersebut dirumuskan program dalam aspek-aspek yang dikualifikasi berdasarkan faktor penentu keberhasilan (*key success factor*) : kelembagaan, ketenagaan, kurikulum, pendidika perpustakaan, penelitian, pengabdian, kemahasiswaan, manajemen, sarana dan dana. Pengembangan kelembagaan meliputi peningkatan bentuk dan status perguruan tinggi penataan fakultas dan jurusan, penambahan jenis dan jenjang program studi keahlian dan profesional, dan peningkatan akreditasi program studi Pengembangan ketenagaan berupa peningkatan kuantitas dan kualitas dosen, pegawai dan pimpinan dengan rekrutmen tenaga, penempatan yang tepat, penugasan studi lanjut penyelenggaraan pelatihan teknis manajemen dan kepemimpinan.

Pengembangan akademik dimulai dengan pengembangan kurikulum agar semakin mantap berkembang dan terarah sesuai dengan kompetensi serta tinggi relevansinya dengan dasar-dasar ilmu ke-Islaman, kehidupan dan lapangan kerja. Pengembangan pembelajaran dilakukan dengan intensifikasi proses perkuliahan, praktikum, penulisan karya ilmiah dan ujian, sesuai dengan pedoman akademik dan diselenggarakan secara seksama oleh para dosen dengan pelayanan yang maksimal dari karyawan dan koordinasi pimpinan.

Pengembangan perpustakaan dilakukan dengan menambah buku pustaka dan meningkatkan kelancaran pelayanannya bagi civitas akademika, yakni dengan pembelian buku, langganan jurnal. dan inovasi pelayanan melalui teknologi informasi pustaka.

Pengembangan penelitian dilakukan dengan melipatgandakan jumlah penelitian dengan metodologi dan kualitas penelitian yang memadai. Serta meningkatkan informasi dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian. Pola penelitian, baik untuk mahasiswa maupun dosen disesuaikan dengan pengembangan keilmuan. Jumlah penelitian ditingkatkan dengan mengakses program dari berbagai lingkungan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau institusi swasta. Pemanfaatan hasil penelitian digunakan untuk menggalakkan diskusi dan seminar serta untuk penerbitan jurnal dan buku-buku yan terkait denan penelitian Ilmiah dalam menunjang Tridarma Perguruan Tinggi.

Pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dengan pendalaman, pengamalan dan pengembangan ilmu agama Islam dalam realitas sosial. seperti kuliah kerja nyata. bakti sosial. dakwah, dan desa binaan. sebagai media partisipasi pembinaan lingkungan kampus dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan kemahasiswaan berupa pembinaan akhlak. kepemimpinan dan kreatifitas dalam natar. bakat minat dan kesejahteraan secara terpadu dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler yang ditangani melalui kerjasama antara seluruh unsur civitas akademika.

Pengembangan manajemen diharapkan untuk mewujudkan efektifitas Program melalui mekanisme proses dan fungsi perencanaan, pelaksanaan..kerjasama. koordinasi dan pengawasan. Inovasi manajemen dicirikan dengan digunakannya sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi komunikasi. dan dengan makin luasnya jejaring. Adapun pengembangan sarana dan dana adalah dengan menggali sumber dana, baik dari intern kampus maupun dari luar, terutama dengan program kerjasama yang dapat mengakses bantuan dana, terutama dengan Pemerintah Daerah.¹⁰

Target hasil perubahan dengan pengembangan IAIN Raden Intan menjadi UIN adalah (1) Lulusan program studi setara dengan lulusan serupa dari perguruan tinggi terkemuka (2) Lulusan dapat melanjutkan tanpa syarat ke jenjang lebih tinggi pada perguruan tinggi manapun (3) Bertambahnya mobilitas lulusan dalam mengisi lapangan pekerjaan profesional (4) Adanya hasil penelitian dan karya ilmiah yang lebih bervariasi, menyentuh realitas kehidupan (5) Keberpihakan program dan budget untuk PTAI meningkat (6) Manajemen pembinaan lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan target tersebut, maka sasaran utama pengembangan adalah mahasiswa, dosen, proses pendidikan dan manajemen. Itulah sebabnya fungsi pelayanan birokrasi untuk civitas akademika dan alokasi dana pengembangan ditujukan untuk mahasiswa,

⁹ Bagir, Zainal Abidin (ed), *Integrasi Ilmu dan Agama, Interpretasi dan Aksi*, Bandung: Mizan, 2005

¹⁰ Armai Arief, *Reformasi Pendidikan Islam*, (Cet; Jakarta: CRSD Press, 2005), h.124.

dosen, proses pendidikan dan manajemen. Pelayanan pemerintah tidak diskriminatif antara PTAIN dan PTAIS, dukungan dan fasilitas diberikan kepada program perguruan tinggi yang mengutamakan peningkatan mutu.¹¹

Perlu dicari perumusan strategi kebijakan yang bersifat terobosan, seperti mengganti regulasi, personil dan program yang sudah tidak efektif dan tidak konsisten dengan tujuan, mengurangi beban dengan merasionalisasi bobot kurikulum dan jumlah program studi, merubah beban menjadi energi dan meningkatkan citra dengan program bernilai unggul dan modern. Atas dasar itu maka untuk pengembangan IAIN Menuju UIN perlu dibuat program unggulan seperti; pengembangan budaya akademik, peningkatan mutu dosen, peningkatan mutu layanan akademik langsung bagi mahasiswa, berupa beasiswa, peningkatan visi, wawasan dan keterampilan manajemen. dan intelektual mahasiswa, bimbingan karir dan pendidikan lanjutan.

Dalam program pengembangan budaya akademik perlu dilakukan kegiatan penataan ulang statuta, standarisasi program studi, standarisasi kompetensi lulusan dan sistem ujian, penataan ulang disiplin ilmu, peningkatan mutu penelitian dan pengabdian, dan peningkatan jaringan kerja sarana akademik. Untuk peningkatan mutu dosen perlu ditempuh program beasiswa studi lanjut, kajian ilmu dan program sertifikasi, pembibitan calon dosen, promosi karir dosen berprestasi, peningkatan kesejahteraan dosen. Untuk peningkatan sarana, dukungan dan beasiswa diusahakan bantuan biaya pendidikan, bantuan program peningkatan mutu, bantuan perpustakaan, bantuan teknologi pembelajaran, bantuan pembangunan dari pemerintah daerah, dan pemanfaatan hibah atau pinjaman luar negeri.

D. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keberadaan dan peran UIN dalam wajah barunya, terutama dalam dunia akademik yang sekaligus dapat berpengaruh pada keberadaannya dalam masyarakat. Peningkatan peran dalam dunia akademik ini berarti menjadikan UIN sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri yang bergengsi secara akademik dan setara dengan lembaga pendidikan tinggi negeri lain, dengan tanpa meninggalkan kekhasan bidang kajiannya.

Namun demikian, masih ada beberapa hal yang menentukan efektivitas kurikulum tersebut, terutama silabus dan tenaga pengajar. Kualitas tenaga pengajar tidak kalah penting dalam menentukan efektivitas kurikulum baru. Betapapun baiknya kurikulum dan silabus, jika tidak didukung tenaga pengajar yang berkualitas akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Penyempurnaan kurikulum UIN (IAIN) merupakan jawaban terhadap dinamika internal UIN, serta tantangan yang berkembang dalam masyarakat, baik dalam konteks nasional maupun global. Penyempurnaan ini memiliki sasaran ganda, yakni meningkatkan kualitas akademik UIN setara dengan pendidikan tinggi negeri lainnya, dan sekaligus mengaitkan pendidikan di UIN dengan dunia ketenagakerjaan. Kurikulum baru juga tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan ketersediaan silabus yang komprehensif, yang berfungsi memberikan arahan tentang pelaksanaan kurikulum. Penyusunan silabus, dengan demikian merupakan hal yang urgen untuk lebih dimatangkan. Di samping itu, kurikulum baru juga bertujuan untuk memberikan ruang kepada para pengelola maupun pengajarnya (dosen) untuk melakukan improvisasi terutama dalam hal pengembangan kurikulum lokal.¹²

Ada beberapa alternatif untuk menerapkan kurikulum lokal ini, *pertama*, pemberian matakuliah yang dianggap penting untuk menunjang bidang studi di jurusan tetapi tidak terdapat dalam kurikulum nasional. *Kedua*, pemberian matakuliah yang mengarah kepada profesi tertentu menjadi spesialisasi jurusan lain tetapi masih dalam satu fakultas, seperti matakuliah pendidikan agama Islam, yang sebenarnya menjadi spesialisasi jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam), bisa diberikan di jurusan KI (Kependidikan Islam). Sehingga alumni KI nantinya dapat menjadi guru agama. *Ketiga*, pemberian matakuliah yang memang sejalan dengan jurusan atau program studi tertentu dan terkait dengan dunia kerja. *Keempat*, pemberian matakuliah yang sama sekali tidak terkait dengan jurusan, tetapi terkait dengan dunia kerja. Dan *kelima*, pengisian kurikulum lokal sepenuhnya dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora – meskipun tidak terkait secara langsung dengan dunia kerja. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan mahasiswa mampu mengembangkan kajian Islam dalam berbagai pendekatan ilmu sosial. Dengan demikian, pada alternatif *ketiga* dan *keempat* tersebut, seluruh kurikulum lokal (57 SKS) diisi dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan dunia kerja. Namun, dalam penerapannya, bentuk alternatif *ketiga* dan *keempat* ini memerlukan kerjasama dengan para pengguna jasa di bidang-bidang dimaksud.

Konversi IAIN menjadi UIN dapat menjadi langkah awal yang sangat positif guna menjembatani terwujudnya suatu lembaga pendidikan tinggi Islam yang otonom. Hal ini sejalan

¹¹ *Ibid.*

¹² Nurman Said, Wahyuddin Halim, Muhammad Sabri, *Sinergi Agama dan Sains*, (ed) (Cet I; Makassar: Alauddin Press, 2005),

dengan tumbuhnya semangat demokratisasi yang menghendaki efisiensi dan efektifitas, serta sebagai upaya pensejajaran dengan perguruan tinggi negeri umum lainnya.

E. Penutup

Penting untuk ditegaskan, bahwa pengembangan IAIN Menuju UIN kedepan merupakan suatu keharusan, untuk menjawab tantangan dan komitmen IAIN dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mendorong pembagunan Daerah melalui peningkatan mutu Sumberdaya Manusia insani yang berinovasi menuju masadepan. Dengan berubahnya IAIN menjadi UIN, maka lembaga pendidikan tinggi dengan wajah baru ini telah mulai merintis terwujudnya pendidikan tinggi Islam yang otonom sebagai upaya meningkatkan eksistensi pendidikan tinggi Islam negeri yang lebih bermutu dan menghasilkan alumni yang mampu bersaing di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet.I, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2006
- _____, *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*, Cet I; Yogyakarta: Penerbit SUKA Press, 2007.
- Arief, Armai. *Reformasi Pendidikan Islam*, Cet. I, Jakarta: CRSD Press, 2005.
- Azra, Azyumardi. *Reintegrasi Ilmu-Ilmu, Integrasi Ilmu dan Agama, Interpretasi dan Aksi*, Bandung: Mizan, 2005
- Azra, Azyumardi, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998).
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Millenium Baru*, Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Bilgrami, Hamid Hasan dan Ashraf, Syed Ali, *Konsep Universitas Islam*, Terj. Machnun Husein, dari judul asli *The Concept of Islamic University*, Cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989).
- Hidayat, Komaruddin (Edt.) dan Prasetyo, Hendro, *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam* (Jakarta: Ditbinpertaiss dan Dirjenbinbagais, 2000).
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, Cet. II, Jakarta; Penerbit: Teraju, 2005
- Nata, Abuddin, "Upaya Mengatasi Tantangan Pendidikan Islam Abad XXI", *Makalah Seminar Pendidikan Islam*, kerjasama Pesantren Hidayatullah dengan Pusat Studi dan Pengembangan Pendidikan Islam (PSPPI), di the ACACIA HOTEL, Jakarta: 17 Juni 2000.
- Nurman Said, Wahyuddin Halim, Muhammad Sabri, *Sinergi Agama dan Sains*, (ed) (Cet I; Makassar: Alauddin Press, 2005),
- Sardar, Ziauddin (Edt.), *Merombak Pola Pikir Intelektual Muslim*, Cet. 1, Terj. Agung Prihantono dan Fuad Arif Fudyartanto, dari judul asli *Ilm and the Revival of Knowledge* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Said, Nurman. dkk, *Sinergi Agama dan Sains*, (ed) Cet I; Makassar: Alauddin Press, 2005.
- Suriasumantri, Jujun S. *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik*, Jakarta: Gramedia, 1986.